

Beberapa Permasalahan dan Upaya Akselerasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Oleh:

Tri Widodo W. Utomo, SH., MA

Abstract

Previously, government's programs on people empowerment were considered to be failed in achieving their targets. One of the reasons is that the programs were improperly designed. At that time, policy on people empowerment was constantly associated to micro credit programs which in reality, unable to strengthen social and economic independency of the citizens. In such a case, this paper offers 5 categories of empowerment program that should be linked to 4 sectors of development, namely economic, social and cultural, political and administrative, and infrastructure dimension. Another important thing is that acceleration of empowerment programs require political will of the government (both in central and local level) to burst through and innovate every single public policy.

Pengantar

Dewasa ini, program pemberdayaan masyarakat banyak sekali diluncurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, terdapat kesan bahwa program ini kurang berhasil mencapai sasaran yang diharapkan, yakni yakni kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosial maupun politis. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan dalam desain program pemberdayaan itu, antara lain bahwa pemberdayaan sering dipersepsikan dan diterjemahkan secara sempit sebagai pemberian akses finansial (penyediaan dana bantuan atau kredit) yang lebih besar kepada anggota masyarakat, khususnya kelompok miskin. Dengan persepsi yang demikian, tidaklah mengherankan bahwa program pemberdayaan seringkali dikemas dalam kerangka program pengentasan kemiskinan.

Kondisi ini mengandung kelemahan mendasar dalam beberapa hal, misalnya:

1. Pemberdayaan masyarakat dimaknakan sebagai pemberdayaan masyarakat miskin semata. Padahal, masyarakat yang tidak berada dibawah garis kemiskinan-pun membutuhkan upaya pemberdayaan pula.

Dalam hal ini, terdapat 2 kritik dari Michael Lipton dan Robert Chamber. Menurut Lipton (1977), program pengentasan kemiskinan sering bias dan salah sasaran. Selanjutnya ia mengatakan bahwa program dan proyek pengentasan kemiskinan di berbagai negara berkembang banyak dilaksanakan di perkotaan, sehingga kemiskinan di pedesaan (*rural poverty*) tidak dapat berkurang secara signifikan. Situasi seperti ini oleh Lipton disebut sebagai bias perkotaan (*urban bias*). Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat melalui program pengentasan kemiskinan dinilai mengalami kegagalan.

Analisis serupa diberikan oleh Robert Chamber (1983: 113-114) yang mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis semata tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dan atau kalori masyarakat secara berkesinambungan, namun lebih pada usaha untuk memberikan "energi" yang lebih besar kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan (*empowerment*). Selanjutnya Chambers menyatakan pula bahwa kemiskinan merupakan suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*)

dan keterasingan (*isolation*). Saling keterkaitan inilah yang disebut sebagai konsep perangkat deprivasi (*concept of deprivation trap*), dimana ketidakberdayaan akan membatasi akses terhadap sumber daya negara, mempersempit keadilan hukum bagi penyelewengan (*abuses*), menyebabkan hilangnya kekuatan tawar menawar (*bargaining power*), membuat rakyat semakin rapuh terhadap permintaan mendadak untuk pembayaran pinjaman atau terhadap permintaan uang suap dalam suatu persengketaan.

Oleh karena itu, Chambers mengajukan pemikiran bahwa upaya untuk mengatasi masalah ketidakberdayaan masyarakat adalah melalui “.... *enabling and empowering the poor through ‘reversals in management’ of dominant paradigms of development which involves shifting power and initiatives downwards and outwards*”. Dengan demikian, suatu proses pemberdayaan haruslah memberikan kesempatan / wewenang dan memberdayakan kaum miskin melalui “terobosan pertukaran manajemen” dalam paradigma pembangunan yang selama ini dominan. Artinya, diperlukan pemindahan atau pengoperan kekuatan dan inisiatif berusaha dari kelompok kuat kepada kaum miskin tersebut.

2. Persepsi bahwa kebijakan pemberdayaan harus dikaitkan dengan program pemberian bantuan lunak secara bergilir (*revolving grant*) juga mengandung bahaya, sebab hal ini justru menciptakan ketergantungan masyarakat. Dengan kata lain, program *micro credit* atau *micro finance* bagi penduduk miskin mencerminkan budaya aparat pemerintah yang masih berorientasi *top down* dan *patronizing* yang terlalu kuat, baik dalam kebijaksanaan maupun perencanaan. Sikap ini sering menimbulkan kondisi ketergantungan (*dependency*) dan kurang menimbulkan keswadayaan masyarakat lokal.

Dimensi dan Kategori Program Pemberdayaan

Mengingat hal tersebut diatas, maka pemahaman tentang strategi pemberdayaan masyarakat harus diluruskan kembali. Kebijakan untuk memberi akses permodalan yang lebih baik melalui pinjaman boleh jadi merupakan metode yang cukup bagus untuk memberdayakan masyarakat. Namun harus disadari betul bahwa hal ini bukanlah satu-satunya strategi pemberdayaan yang paling baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya memberdayakan masyarakat, penggunaan pendekatan tunggal jelas tidak dapat dibenarkan. Dalam hal ini, perlu dikembangkan pendekatan lain untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pendekatan baru dalam perumusan kebijakan pemberdayaan tersebut, maka perlu ditentukan dua hal. *Pertama* tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan, sedang *kedua* adalah kategorisasi dari program pemberdayaan itu sendiri.

Tentang dimensi dan tingkatan pemberdayaan, paling tidak ada 3 level ¹ yang harus dicapai oleh program pemberdayaan, yakni: 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 2) pemberdayaan pada level kelompok / organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud

¹ 3 level pemberdayaan ini merujuk pada kajian UNDP tentang Capacity Building yang membagi tingkatan pengembangan kapasitas menjadi 3, yaitu individual level, entity or organizational level, dan system level. Lihat: UNDP, 1998, *Capacity Assessment and Development in A System and Strategic Management Context*, Technical Advisory Paper No. 3.

meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis. Adapun indikator dari masing-masing dimensi dan tingkatan pemberdayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat	
Dimensi	Indikator
<i>Level Individu:</i> Pengembangan potensi dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan aset / modal • Kekuatan fisik • Tidak terisolasi • Penguasaan keterampilan • Keberfungsian lembaga usaha
<i>Level Kelompok / Organisasi:</i> Partisipasi dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pengambilan keputusan • Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama • Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
<i>Level Sistem:</i> Kemandirian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar

Sementara pada aspek kedua yakni kategorisasi program pemberdayaan, paling tidak ada 5 (lima) kelompok besar pemberdayaan, yakni:

1. Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya seperti modal, informasi, kesempatan berusaha dan memperoleh kemudahan / fasilitas, dan sebagainya.

Pemberian pinjaman lunak, penerbitan dan penyebaran bulletin, subsidi bagi pengusaha lemah, dan sebagainya dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas dalam kategori ini.

2. Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan.

Sebagai contoh, kawasan perkotaan yang memiliki kelengkapan infrastruktur transportasi dan komunikasi, lembaga keuangan bank dan non-bank, jaringan pemasaran, dan lain-lain adalah contoh kondisi yang memiliki faktor-faktor keunggulan. Disisi lain, kawasan pedesaan sering dicirikan oleh karakteristik yang sebaliknya. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang bisa mendekatkan kesenjangan (*gap*) antara kawasan perkotaan dan pedesaan dapat digolongkan sebagai pemberdayaan masyarakat. Lebih konkrit lagi dapat dicontohkan bahwa pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat, sedangkan penambahan ruas jalan raya di perkotaan tidak termasuk sebagai pengertian pemberdayaan dalam konteks penelitian ini.

Contoh lain, ada lahan pertanian yang sudah dilengkapi dengan prasarana irigasi sementara lahan lain tidak memiliki prasarana yang sama. Kebijakan pertanian yang ditempuh selama ini lebih banyak difokuskan kepada lahan yang sudah memiliki faktor keunggulan (cq. jaringan irigasi) dengan alasan untuk mendongkrak produksi

panen. Seandainya pemerintah mempromosikan program intensifikasi pertanian untuk lahan yang tidak memiliki jaringan irigasi, maka hal ini berarti telah terjadi pemberdayaan pertanian rakyat, sekaligus pemberdayaan petani.

3. Pengembangan potensi masyarakat baik dalam pengertian SDM maupun kelembagaan masyarakat.

Setiap upaya untuk merubah kondisi dari bodoh menjadi pintar, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tuna keterampilan menjadi terampil, dan sebagainya, jelas sekali merupakan program pemberdayaan. Aktivitas semacam pelatihan, penyuluhan dan kursus-kursus yang diselenggarakan secara sistematis dengan tujuan memperkuat potensi masyarakat, adalah contoh nyata dari aksi pemberdayaan. Demikian pula, setiap upaya yang ditujukan untuk memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti KUD, P3A, dan sebagainya dapat dikelompokkan sebagai kebijakan pemberdayaan.

4. Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum.

Dalam banyak kasus ditemukan adanya fenomena bahwa masyarakat (khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan), telah memiliki kemampuan ekonomis dan manajerial yang memadai untuk mengelola suatu kegiatan tertentu seperti perbaikan jalan kampung dan gorong-gorong, penyediaan air bersih melalui pembangunann sumur artesis atau sistem bak penampungan, dan sebagainya. Hanya saja, hal ini sering terbentur pada kendala koordinasi dan inisiatif untuk memulainya. Dalam situasi seperti itulah, kebijakan pemerintah untuk mengucurkan stimulan atau perangsang, sangat berarti. Stimulan disini bisa berwujud pemberian perijinan, bantuan teknis, atau pemberian dana suplemen bagi suatu kegiatan tertentu.

5. Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Seiring dengan paradigma pembangunan yang bertumpu dan berorientasi pada rakyat (*people-based and people-oriented development*), rakyat harus diakui dan ditempatkan sebagai elemen kunci dalam perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan-kebijakan pembangunan. Beberapa contoh program pemberdayaan yang masuk dalam kategori ini misalnya pembentukan forum konsultasi pembangunan, deregulasi perijinan pendirian LSM atau NGO, eliminasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas (keturunan, wanita, penduduk asli/pendatang, dll), dan sebagainya. Gagasan pembentukan Dewan Kota juga dapat diklasifikasikan kedalam kategori ini.

Urgensi pelibatan unsur masyarakat / LSM dalam perencanaan pembangunan ini semakin menguat disebabkan adanya fakta bahwa konsep perencanaan pengembangan daerah senantiasa meloncat-loncat, tak konsisten, dan tak berkesinambungan (*sustainable*) sehingga kemudian muncul adagium ganti Kepala Daerah ganti kebijakan. Akhirnya, pembangunan daerah pun menjadi carut-marut sementara gulungan berbagai persoalan di daerah menjadi semakin rumit (Oekan S. Abdullah, *PR*, 12/9/03). Kondisi seperti ini diakui oleh Dirjen Perkotaan Depdagri yang mengatakan bahwa perencanaan daerah/kota selama ini bersifat tertutup sehingga aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, termasuk perancang kota, sebagai pelaku pembangunan, tidak tertampung dengan baik. Bahkan, masyarakat cenderung dipandang sebagai obyek pembangunan atau kelompok obyek fungsional perencanaan (*Kompas*, 12/9/03).

Setelah menetapkan kategorisasi, langkah selanjutnya dalam menganalisa kebijakan pemberdayaan adalah menetapkan bidang dan strategi pencapaiannya. Dalam hal ini, paling tidak ada 4 (empat) bidang pencapaian untuk mengakselerasi kebijakan pemberdayaan, yakni ekonomis, sosbud, politis / administratif, serta prasarana. Sebagai contoh, untuk kategori pemberdayaan yang pertama yakni “penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya”, secara ekonomis hal ini bisa dicapai dengan cara pemberian pinjaman lunak dan subsidi bagi pengusaha lemah, penyebaran informasi peluang pasar domestik dan internasional, atau melalui pemberian dana suplemen. Sementara dari aspek sosial budaya dapat ditempuh melalui penerbitan dan penyebaran bulletin, penyediaan sarana promosi / pengadaan pekan promosi, promosi program intensifikasi sektoral seperti pertanian, serta penyelenggaraan kursus dan berbagai macam pelatihan.

Selanjutnya, dalam aspek politis / administratif dapat dilakukan langkah-langkah strategis seperti membangun kemitraan dengan sektor swasta, memperkuat keberfungsian atau meningkatkan efektivitas lembaga kemasyarakatan, memberikan kemudahan dalam proses perijinan (deregulasi), menghilangkan perlakuan yang diskriminatif terhadap masyarakat dan dunia usaha, membangun forum konsultasi pembangunan, dan sebagainya. Adapun dari aspek infrastruktur dapat dipertimbangkan untuk beberapa langkah seperti pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus, bantuan material fisik sebagai bentuk rangsangan, dan sebagainya.

Analisis program pemberdayaan masyarakat berdasarkan kategori serta bidang / strategi pencapaiannya ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Analisis Kebijakan Pemberdayaan Berdasarkan Kategori
dan Bidang / Strategi Pencapaiannya

Kategori Pemberdayaan	Bidang/ Strategi Pencapaian			
	Ekonomis	Sosbud	Politis/ Administratif	Prasarana
Penyediaan akses yang lebih terbuka, luas dan lebar terhadap sumber-sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan modal / pinjaman lunak • Subsidi bagi pengusaha lemah • Informasi peluang pasar domestik dan internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan dan penyebaran bulletin • Penyediaan sarana promosi / pengadaan pekan promosi 	n.a.	n.a.
Peningkatan keseimbangan antara sebuah kondisi yang memiliki keunggulan dengan kondisi lain yang tidak memiliki keunggulan	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi program intensifikasi pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun kemitraan dengan sektor swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan daerah terisolir melalui pembangunan jalan tembus
Pengembangan	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan, 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk 	n.a.

potensi masyarakat (SDM maupun kelembagaan)		penyuluhan dan kursus-kursus	memperkuat keberfungsian / meningkatkan efektivitas lembaga kemasyarakatan	
Penyediaan stimulus untuk membangkitkan swadaya dan dan swakelola dalam bidang pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian dana suplemen 	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam pemberian perijinan • Bantuan teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan semen atau aspal
Penyertaan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan	n.a.	n.a.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan forum konsultasi pembangunan • Deregulasi perijinan pendirian LSM • Eliminasi perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas • Pembentukan Dewan Kota 	n.a.

Beberapa Contoh *Best Practices* dalam Pemberdayaan Masyarakat (Kasus Kota Bandung) ²

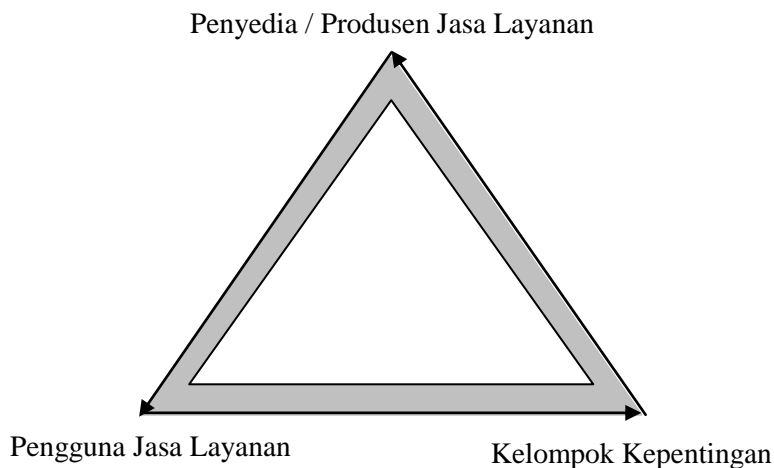
Dewasa ini, ada kecenderungan untuk membudayakan praktek-praktek terbaik dalam proses pembangunan kemasyarakatan ataupun kegiatan pemerintahan. Sekecil apapun lingkup dan volume kegiatan, namun jika dapat menjadi contoh yang baik bagi reformasi kelembagaan atau ketatalaksanaan, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai *best practices* yang perlu terus dikembangkan. Adapun beberapa contoh *best practices* di wilayah Kota Bandung adalah:

1. Gerakan Lumbung Kota (GLK) adalah sebuah LSM yang memegang peran cukup penting di bidang sosial selama berlangsungnya krisis moneter (1999-2001). GLK memobilisasi sekitar 400 ketua dan sekretaris RW dan menjalankan 3 aktivitas utama yakni: mendorong gerakan moral, mengumpulkan dana untuk beasiswa bagi anak-anak miskin, serta memberdayakan usaha kecil dengan cara memberi pinjaman dana lunak. Metode penggalangan dana dilakukan melalui pengumpulan dan penjualan barang-barang bekas, yang dikelola oleh Radio Cepi. Rata-rata, usaha ini mampu meraih Rp. 6-8 juta / tahun yang dipergunakan untuk membeli sembako. Sembako ini selanjutnya dijual kepada penduduk miskin dengan harga yang jauh lebih

² Sebagian dari contoh-contoh program pemberdayaan disini diambilkan dari temuan hasil penelitian penulis pada saat menyelesaikan program Master di GSID, Nagoya University. Lihat: Utomo, Tri Widodo W., 2004, *Decentralization and Capacity Building in Indonesian Local Administration: A Long Journey for Discovering A Model of Democratic Developmental Regime (Case Study of Bandung City Government)*. Unpublished Master Thesis, Graduate School of International Development, Nagoya University.

rendah dari harga pasaran, yakni hanya 40% dari harga normal. Uang yang terkumpul lantas dialokasikan dalam program beasiswa dan kredit kecil. Dalam hal ini, setiap pelaku bisnis kecil memperoleh pinjaman paling besar Rp 200.000. Walaupun jumlahnya relative kecil, namun sangat membantu masyarakat untuk dapat bertahan hidup. Disaat pemerintah menghadapi krisis keuangan, organisasi kemasyarakatan ini dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan.

2. Di sebuah RT di perumahan Wijayakusumah, Cigadung, terdapat sepetak tanah yang diperuntukkan sebagai TPS sampah. Disamping menimbulkan bau busuk dan merusak pemandangan, kondisi ini juga mengandung potensi menimbulkan gangguan kesehatan. Namun atas kesepakatan warga, penggunaan lahan tadi dirubah. TPS dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga, dan lokasi bekas TPS tadi didirikan kios-kios kecil yang disewakan kepada pedagang dengan pembayaran uang sewa tertentu. Dampaknya cukup luar biasa: lingkungan menjadi bersih, dan RT memiliki sumber kas baru untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Dalam kasus seperti ini, RT atau RW tidak hanya berfungsi sebagai agen sosial yang mengurus masalah-masalah kependudukan atau masalah lain seperti konflik antar anggota, aktivitas olahraga atau keagamaan, dan lain-lain. Lebih dari itu, RT / RW memiliki potensi yang besar untuk menjadi kelompok *entrepreneur* baru.³
3. Di RW 11 Kel. Cibangkong dan RW 1 Kel. Gempol Sari, pelayanan kebutuhan air bersih dikelola secara swakelola. Caranya, RW membangun sumur artesis (sekitar 60m) dan menjualnya kepada warga sekitar dengan harga yang lebih murah dibanding harga air PDAM. Dalam hal ini, konsep *good local governance* diimplementasikan dalam penyediaan layanan air bersih, dimana masyarakat bertindak selaku penyedia jasa layanan (*service provider*), pengguna (*service user*), sekaligus kelompok kepentingan (*concern groups*). Dalam bentuk gambar, model *good local governance* dalam layanan air bersih dapat dilihat sebagai berikut:



Regulasi penambangan air bawah tanah (kedalaman 60 m atau lebih) nampaknya perlu digalakkan kembali. Sebab, ada kecenderungan bahwa pembangunan sumur bor oleh perseorangan tidak memiliki ijin. Akibatnya, kerugiannya menjadi berlipat, misalnya: 1) Kondisi lingkungan makin tidak terkontrol, 2) Kesenjangan makin lebar

³ Utomo, Tri Widodo W., 2003, *Keeping Local Authorities Democratic through the Empowerment of Local Institutions*, dalam Jurnal "Indonesian Business Perspective" Vol. 5, No. 6, August-September.

antara yg mampu atau bisa membangun sumur bor, dengan yg tidak, serta 3) Pemda tidak mendapat pemasukan. Itulah sebabnya, hak membangun sumur bor ini sebaiknya diserahkan pada kelompok (besaran kelompok tentu bisa ditentukan kemudian). Selain itu, hak pembuatan sumur artesis mestinya juga diikuti dengan kewajiban-kewajiban tertentu, seperti membuat rusup resapan atau menanam pohon.⁴ Kalau desentralisasi pengelolaan air sudah diterima oleh kelompok, maka kelompok-kelompok tadi sekaligus bisa merangkap fungsi sebagai sosialisator dari Perda tersebut. Disamping itu, kalau hak membangun artesis ada pada kelompok, maka upaya monitoring dan pengendalian dari pemda jauh lebih mudah, sehingga upaya perlindungan lingkungan dapat lebih terjamin.

Memang idealnya, air yg kita gunakan sehari2 adalah pengolahan / purifikasi dari air sungai yg dikelola Pemda. Namun hal ini terbentur bbrp kendala antara lain: 1) Sungainya sendiri kotor dan tidak memadai volumenya, 2) Pemda belum memiliki teknologi olah air yg canggih, serta 3) Kinerja Pemda rendah sementara kebutuhan air makin mendesak. Dengan demikian, penggalian air bawah tanah hanya merupakan *escape mechanism* dari kendala-kendala tersebut. Yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita tetap peduli untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang.

4. Di Kecamatan Marga Cinta, motivasi dan kepedulian warga untuk membangun lingkungannya semakin meningkat, yang diindikasikan oleh tingginya tingkat swadaya. Sebagai contoh, pada pembangunan gorong-gorong di Jalan Rancabolang, warga dapat berkontribusi sebesar Rp. 75 juta, sementara pemerintah Kecamatan hanya mengeluarkan dana stimulant sebesar Rp. 11,5 juta. Dan swadaya masyarakat di Kecamatan ini mencapai 800 juta / tahun. Kondisi yang serupa terjadi juga di Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, dimana dana sukarela dari masyarakat yang terakumulasi dalam berbagai proyek pembangunan selama tahun 2000-2002 mencapai Rp. 1,2 milyar.

Catatan Penutup

Contoh-contoh diatas menggambarkan dengan jelas bahwa program pemberdayaan tidak selamanya harus lahir dari inisiatif pemerintah, atau selalu dalam bentuk bantuan kredit lunak. Justru jika dirangsang dan dikelola dengan baik, potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal, yang pada gilirannya akan sangat meringankan beban pemerintah dalam fungsi-fungsi layanan publik maupun tugas pembangunan secara umum.

Dengan demikian, sekali lagi dapat ditegaskan bahwa kita membutuhkan program pemberdayaan yang non-konvensional dan inovatif sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dari program yang ada selama ini. Untuk itu, keberanian dan kemauan politik dari pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan sangat menentukan hasil akhir dari proses pemberdayaan masyarakat ini. Dalam hal ini, meskipun masyarakat memiliki potensi diri (*inner power*) yang kuat, namun tanpa dukungan dari sistem kebijakan publik yang memadai, maka potensi tadi jelas tidak dapat tergali secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat haruslah ditempuh dengan cara memadukan pendekatan *top-down initiatives* dengan *bottom-up capacity*.

⁴ Hal ini sebenarnya sudah di mulai di Bandung, dimana setiap rumah harus memiliki 1 sumur resapan dan menanam paling sedikit 1 pohon (Perda No. 14/1998). Sayangnya, peraturan ini nampaknya gagal dalam tahap implementasi.

Referensi

- Chambers, Robert, 1983, *Rural Development: Putting the Last First*, New York, Longman.
- Lipton, Michael, 1977, *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- UNDP, 1998, *Capacity Assessment and Development in a System and Strategic Management Context*, Technical Advisory Paper No. 3.
- Utomo, Tri Widodo W., 2003, *Keeping Local Authorities Democratic through the Empowerment of Local Institutions*, dalam Jurnal "Indonesian Business Perspective" Vol. 5, No. 6, August-September, Jakarta: Harvest Indonesia.
- Utomo, Tri Widodo W., 2004, *Decentralization and Capacity Building in Indonesian Local Administration: A Long Journey for Discovering A Model of Democratic Developmental Regime (Case Study of Bandung City Government)*. Unpublished Master Thesis, Graduate School of International Development, Nagoya University.